



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI**

NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015

**TENTANG**

**PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI,**

**Menimbang**

- : a. bahwa dengan adanya Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota, maka Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, perlu dilakukan penyesuaian;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Perubahan Kedua Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.

**Mengingat**

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4674) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2013 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 232, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
6. Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008, dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
11. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 09 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2015;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 01/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Hari Pemungutan Suara Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 02/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.
14. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015.

**Memperhatikan**

- :
1. Naskah Perjanjian Hibah Daerah Nomor 900/Pj.13-Huk/2015 Tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015;
  2. Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi tanggal 15 Juli 2015.

**MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan**

- :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**KESATU**

- :
- Mengubah ketentuan dalam Lampiran I Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagai berikut :

1. Ketentuan dalam BAB II huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 diikuti oleh Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat sebagaimana telah diatur dalam Pasal

[jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi](http://jdih.kpu.go.id/jabar/sukabumi)

7 Undang-Undang Nomor 8 tahun 2015 Junc to Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan Peraturan KPU Nomor 12 Tahun 2015 yaitu :

- a. bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. setia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus 1945, dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- c. berpendidikan paling rendah sekolah lanjutan tingkat atas atau sederajat;
- d. berusia paling rendah 25 (dua puluh lima) tahun;
- e. mampu secara jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim dokter;
- f. *bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, secara kumulatif wajib memenuhi syarat sebagai berikut:*
  1. *secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan*
  2. *bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang.*
- f1. *bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana, syarat yang harus dipenuhi adalah telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran;*
- g. tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- h. tidak pernah melakukan perbuatan tercela yang dibuktikan dengan surat keterangan catatan kepolisian;
- i. menyerahkan daftar kekayaan pribadi;
- j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;
- k. tidak sedang dinyatakan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- l. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak dan memiliki laporan pajak pribadi;
- m. belum pernah menjabat sebagai Bupati atau Wakil Bupati selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- n. belum pernah menjabat sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati dan Walikota untuk Calon Bupati atau Calon Wakil Bupati;
- o. berhenti dari jabatannya bagi Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota dan Wakil Walikota yang mencalonkan diri sebagai Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sejak ditetapkan sebagai Calon;
- p. tidak berstatus sebagai penjabat Bupati;
- q. *dihapus;*
- r. *memberitahukan pencalonannya sebagai Bupati atau Wakil Bupati kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat, kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Daerah, atau kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bagi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan mengundurkan diri sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;*

- s. *mengundurkan diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;*
  - t. *mengundurkan diri sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah yang tidak dapat ditarik kembali sejak ditetapkan sebagai calon;*
  - u. *berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS."*
2. *Ketentuan dalam BAB IV huruf A diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :*
1. *Menerbitkan Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi tentang Penetapan Jumlah Kursi dan Jumlah Suara Sah Paling Rendah untuk Calon yang Diajukan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015.*
  2. *Salinan Keputusan sebagaimana dimaksud dalam angka 1 disampaikan kepada pimpinan DPRD, pimpinan partai politik, dan Panwas Kabupaten Sukabumi.*
  3. *Melaksanakan sosialisasi PKPU Pencalonan dan Perangkat pendukung Sistem Pencalonan (SILON).*
  4. *Menerima Surat Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang sudah disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM dari KPU melalui KPU Provinsi.*
  5. *Dalam hal keputusan terakhir dari Menteri tentang kepengurusan Partai Politik tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam angka 4 masih dalam proses penyelesaian sengketa di pengadilan, KPU Kabupaten Sukabumi menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.*
  6. *Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 5 terdapat penetapan pengadilan mengenai penundaan pemberlakuan keputusan Menteri, KPU Kabupaten Sukabumi tidak dapat menerima pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan adanya putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan penerbitan keputusan dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik.*
  7. *Apabila dalam proses penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada angka 6 belum terdapat putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dan kepengurusan Partai Politik yang bersengketa melakukan kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sesuai peraturan perundang-undangan, KPU Kabupaten Sukabumi menerima pendaftaran Pasangan Calon berdasarkan keputusan terakhir dari Menteri tentang penetapan kepengurusan Partai Politik hasil kesepakatan perdamaian.*
  8. *Dalam hal kesepakatan perdamaian untuk membentuk 1 (satu) kepengurusan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 7 tidak tercapai, sambil menunggu putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, Partai Politik dari 2 (dua) kepengurusan hasil Muktamar/Munas/Kongres dapat memberikan persetujuan untuk 1 (satu) Pasangan Calon yang sama.*
  9. *Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten hanya terdapat 1 (satu) kepengurusan, Pengurus Partai Politik di tingkat pusat menuangkan dalam surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat tersebut.*

10. *Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 8.*
  11. *Dalam hal kepengurusan Partai Politik di tingkat kabupaten terdapat 2 (dua) kepengurusan dan bergabung dengan Partai Politik lain, masing-masing pengurus Partai Politik tersebut mengajukan 1 (satu) Pasangan Calon yang sama pada Gabungan Partai Politik yang sama sesuai dengan persetujuan Partai Politik di tingkat pusat sebagaimana dimaksud pada angka 8.*
  12. *Apabila pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud pada angka 8, mengajukan Pasangan Calon yang berbeda dan/atau mengusulkan Pasangan Calon yang sama tetapi pada Gabungan Partai Politik yang berbeda, KPU Kabupaten Sukabumi menolak pendaftaran Pasangan Calon dimaksud.*
  13. *Dalam hal terdapat putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, pelayanan terhadap peserta Pemilihan dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusung berpedoman pada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan ditindaklanjuti dengan keputusan Menteri.*
  14. *Proses yang telah dan sedang berlangsung pada saat adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, dinyatakan tetap sah dan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak dapat menarik pengajuan Pasangan Calonnya.”*
3. Ketentuan dalam BAB IV huruf C angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- “10. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dalam mendaftarkan pasangan calon yang telah memenuhi syarat wajib melaksanakan:
- a. menyerahkan surat pendaftaran pasangan calon dari Partai Politik/Gabungan Partai Politik beserta lampirannya yang ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau para Pimpinan Partai Politik yang bergabung sesuai dengan tingkatannya;
  - b. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang persetujuan Pasangan Calon dan dokumen syarat calon;
  - c. menyertakan Keputusan Pimpinan Partai Politik tingkat pusat tentang kepengurusan Partai Politik tingkat provinsi dan/atau kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten/kota.
  - d. *Masing-masing Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan di tingkat pusat sebagaimana dimaksud dalam menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada pengurus Partai Politik kabupaten Sukabumi.*
  - e. *Dalam hal kepengurusan Partai Politik di kabupaten Sukabumi terdapat 2 (dua) kepengurusan, masing-masing pengurus Partai Politik tingkat pusat menyerahkan keputusan persetujuan Pasangan Calon kepada masing-masing pengurus di kabupaten Sukabumi.*
  - f. *Pengurus Partai Politik atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf d dan e menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan Pasangan Calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi.*
  - g. *Dalam hal pengurus Partai Politik sebagaimana dimaksud atau 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud pada huruf f bergabung dengan Partai Politik lain, Gabungan Partai Politik tersebut menyerahkan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon kepada KPU Kabupaten Sukabumi.*

- h. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan pengurus Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tingkat kabupaten kepada KPU Kabupaten Sukabumi dilengkapi juga dengan:
    - 1). Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
    - 2). surat pernyataan keberadaan 1 (satu) kepengurusan di tingkat kabupaten sebagaimana dimaksud dalam BAB IV huruf A angka 9.
  - i. Dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon yang wajib disampaikan 2 (dua) kepengurusan Partai Politik tingkat kabupaten atau Gabungan Partai Politik kepada KPU Kabupaten Sukabumi sebagaimana dimaksud huruf e dan g dilengkapi juga dengan:
    - 1). 2 (dua) dokumen Surat Pencalonan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung menggunakan formulir Model B-KWK Parpol;
    - 2). Keputusan dari masing-masing Pimpinan Partai Politik tingkat pusat yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan tentang persetujuan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.1-KWK Parpol;
    - 3). (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung untuk mengusulkan Pasangan Calon menggunakan formulir Model B.2-KWK Parpol;
    - 4). (dua) dokumen surat pernyataan kesepakatan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung dengan Pasangan Calon untuk mengikuti proses Pemilihan menggunakan formulir Model B.3-KWK Parpol;
    - 5). 2 (dua) dokumen surat pernyataan yang masing-masing ditandatangani oleh pimpinan masing-masing pengurus Partai Politik yang mempunyai 2 (dua) kepengurusan atau para pimpinan Partai Politik yang bergabung yang menyatakan visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah, ditandatangani oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik menggunakan formulir Model B.4- KWK Parpol;
    - 6). fotokopi rekening khusus dana kampanye yang dibuka oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik atas nama calon dan spesimen tanda tangan sesuai kesepakatan;
    - 7). 1 (satu) berkas dokumen administrasi persyaratan Bakal Calon sebagaimana dimaksud pada Ketentuan dalam BAB IV C angka 13.
4. Ketentuan dalam BAB IV huruf C angka 11 e, f dan g diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- e. berkenaan dengan Calon yang berstatus sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah atau Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat 24 Oktober 2015. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dimaksud, dinyatakan tidak memenuhi syarat.

- f. berkenaan dengan Calon yang berstatus sebagai pejabat atau pegawai pada Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah wajib menyampaikan keputusan pejabat yang berwenang tentang pemberhentian dari Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah kepada KPU Provinsi/KIP Aceh atau KPU/KIP Kabupaten/Kota paling lambat paling lambat 24 Oktober 2015. Calon yang tidak menyampaikan keputusan dimaksud, dinyatakan tidak memenuhi syarat.
- g. dihapus
5. Ketentuan dalam BAB IV huruf C angka 11 i diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:  
"i. berkenaan dengan syarat calon yang pernah dijatuhi pidana penjara berlaku ketentuan sebagai berikut :
- 1) dikecualikan bagi:
    - a) calon yang dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*);
    - b) calon yang dipidana penjara karena alasan politik.
  - 2) bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara wajib menyerahkan:
    - a) surat pernyataan sebagai mantan narapidana yang secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana dan bukti dimuat pada surat kabar lokal/nasional; dan
    - b) surat keterangan yang menyatakan bahwa Calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dari Kepolisian Resor.
  - 3) bagi calon yang pernah dijatuhi pidana penjara dan tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana wajib menyerahkan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan;
  - 4) bagi calon yang pernah dipidana penjara karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik wajib menyerahkan surat keterangan dipidana karena kealpaan ringan (*culpa levis*) dan/atau alasan politik berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari pengadilan negeri yang menjatuhkan putusan."
6. Ketentuan dalam BAB IV huruf C angka 11 r ditambah, sehingga berbunyi sebagai berikut :
- 1) Melampirkan fotokopi Ijazah/Surat Tanda Tamat Belajar (STTB) SD, SLTP dan SLTA sederajat yang telah dilegalisasi oleh sekolah yang bersangkutan;
  - 2) Apabila pasangan calon mencantumkan riwayat pendidikan di atas SLTA atau sederajat, pasangan calon wajib menyertakan fotokopi ijazah perguruan tinggi negeri atau swasta yang dilegalisasi oleh pejabat yang berwenang di perguruan tinggi yang bersangkutan;
  - 3) Pasangan Calon dapat mencantumkan gelar akademik, gelar sosial/adat, dan/atau gelar keagamaan pada dokumen persyaratan pencalonan dan syarat calon, dimana pencantuman gelar akademik harus dibuktikan dengan fotokopi ijazah yang telah dilegalisir."
7. Menambah angka 3A setelah angka 3 dalam ketentuan dalam BAB V huruf B sebagai berikut :
- "3A. a. Apabila dalam proses penelitian persyaratan administrasi, pada surat keterangan catatan kepolisian terdapat catatan masalah hukum, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi ke Kejaksaan Negeri dan Pengadilan Negeri untuk memastikan adanya putusan yang berkekuatan hukum tetap.
- b. Dalam hal sudah terdapat putusan yang berkekuatan hukum tetap sebagaimana dimaksud diatas, KPU Kabupaten Sukabumi melakukan klarifikasi ke Lembaga Pemasyarakatan untuk memperoleh informasi bahwa yang bersangkutan: pernah dipidana penjara; atau telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum jadwal pendaftaran."

- KEDUA** : Mengubah Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 **menjadi satu naskah** sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA** : Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Lampiran II Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Pedoman Teknis Pencalonan pada penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi Nomor 33/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 *dinyatakan tidak berlaku.*
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Sukabumi  
Pada tanggal : 15 Juli 2015

Untuk SALINAN yang sah  
Sesuai dengan aslinya  
KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI  
Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI  
 NOMOR : 42/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015  
 TANGGAL : 15 JULI 2015  
 TENTANG : PERUBAHAN KEDUA KEPUTUSAN KPU KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 19/Kpts/KPU-Kab-011.329980/TAHUN 2015 TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PADA PENYELENGGARAAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015

**DAFTAR FORMULIR PENCALONAN  
 PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI TAHUN 2015**

<b>A. Syarat Calon</b>		
1.	<b>Model BB.1-KWK</b>	Surat Pernyataan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	<b>Model BB.2-KWK</b>	Daftar Riwayat Hidup Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model BB.3-KWK</b>	Surat Pernyataan Pengunduran Diri
<b>B. Syarat Pencalonan dari Partai Politik</b>		
1.	<b>Model B-KWK Parpol</b>	Surat Pencalonan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik
2.	<b>Model B.1-KWK Parpol</b>	Keputusan Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model B.2-KWK Parpol</b>	Surat Pernyataan Kesepakatan Partai politik / Gabungan Partai Politik dalam Pencalonan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	<b>Model B.3-KWK Parpol</b>	Surat Pernyataan Kesepakatan Antara Partai Politik/Gabungan Partai Politik Dengan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	<b>Model B.4-KWK Parpol</b>	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan RPJP Daerah
<b>C. Syarat Pencalonan dari Perseorangan</b>		
1.	<b>Model B-KWK Perseorangan</b>	Surat Pencalonan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dari Perseorangan
2.	<b>Model B.1-KWK Perseorangan</b>	Surat Pernyataan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model B.2-KWK Perseorangan</b>	Rekapitulasi Jumlah Dukungan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	<b>Model B.3-KWK Perseorangan</b>	Surat Pernyataan Tidak Mendukung Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
5.	<b>Model B.4-KWK Perseorangan</b>	Surat Pernyataan Kesesuaian Naskah, Visi, Misi, dan Program Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan RPJP Daerah
<b>D. Berita Acara Perseorangan</b>		
1.	<b>Model BA.1-KWK Perseorangan</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Jumlah Minimal Dukungan dan Pesebaran Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	<b>Model BA.2-KWK Perseorangan</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Dugaan Kegandaan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

3.	<b>Model BA.3.1-KWK Perseorangan</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Administrasi Terhadap Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
4.	<b>Model BA.3.2-KWK Perseorangan</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Faktual Terhadap Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Panitia Pemungutan Suara (PPS)
5.	<b>Model BA.4-KWK Perseorangan</b>	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kecamatan (oleh PPK )
6.	<b>Model BA.4.1-KWK Perseorangan</b>	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kecamatan
7.	<b>Model BA.4.2-KWK Perseorangan</b>	Surat Pengantar Penyampaian Berita Acara Hasil Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kecamatan
8.	<b>Model BA.5-KWK Perseorangan</b>	Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kabupaten
9.	<b>Model BA.5.1-KWK Perseorangan</b>	Catatan Kejadian Khusus dan/atau Keberatan dalam Pelaksanaan Rekapitulasi Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi di tingkat Kabupaten
<b>E. Berita Acara Penelitian dan Tanda Terima</b>		
1.	<b>Model BA.HP-KWK dan Lampiran Model BA.HPKWK</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
2.	<b>Model BA.HP Perbaikan KWK dan Lampiran Model BA.HP Perbaikan-KWK</b>	Berita Acara Hasil Penelitian Perbaikan Persyaratan Administrasi Dokumen Persyaratan Pencalonan dan Persyaratan Calon dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
3.	<b>Model TT.1-KWK dan Lampiran Model TT.1-KWK</b>	Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi
4.	<b>Model TT.2-KWK dan Lampiran Model TT.2-KWK</b>	Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi

Untuk SALINAN yang sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,



KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

*ttd*

**DEDE HARYADI**

**SURAT PERNYATAAN  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI SUKABUMI \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. N I K : .....
- c. Jenis kelamin : .....
- d. Pekerjaan : .....
- e. Tempat dan tanggal lahir/ umur ..... / .....tahun
- f. Alamat tempat tinggal .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya :

**A. UMUM**

1. bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
2. setia kepada Pancasila sebagai Dasar Negara, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, cita-cita Proklamasi Kemerdekaan 17 Agustus Tahun 1945 dan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
3. tidak akan mengundurkan diri sebagai calon Bupati atau Wakil Bupati Sukabumi;
4. belum pernah menjabat sebagai Gubernur atau Wakil Gubernur\*), Bupati atau Wakil Bupati\*), serta Walikota atau Wakil Walikota\*) selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama;
5. belum pernah menjabat sebagai :
  - a. Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati;
  - b. Wakil Gubernur untuk Calon Bupati, Calon Wakil Bupati; dan
  - c. Bupati atau Walikota untuk Calon Wakil Bupati;
6. tidak berstatus sebagai pejabat Bupati.

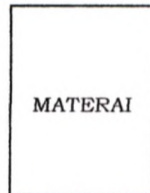
**B. KHUSUS\*\*)**

1. pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, dan :
- a. secara terbuka dan jujur telah mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana serta bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang dengan melampirkan bukti pengumuman yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional serta Surat Keterangan dari Kepolisian Daerah/Kepolisian Resor\*); atau
- b. tidak bersedia secara terbuka dan jujur mengumumkan kepada publik sebagai mantan terpidana, tetapi telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dengan dibuktikan surat keterangan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran dari kepala lembaga pemasyarakatan.
2. berhenti dari jabatan sebagai Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain sejak ditetapkan sebagai calon dan pada saat pendaftaran melampirkan fotokopi surat permohonan pemberhentian dari jabatan dan salinan surat keterangan bahwa permohonan berhenti dari jabatan telah diterima dan pemberhentiannya sedang dalam proses yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang, serta akan menyampaikan surat keputusan pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 1 (satu) hari sebelum penetapan calon peserta Pemilihan.
3. memberitahukan pencalonan saya selaku anggota Anggota DPR/DPD/DPRD\*) bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) dengan melampirkan surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD\*) dan mengundurkan diri sebagai Anggota DPR/DPD/DPRD\*) serta akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.

4. mengundurkan diri sebagai :
- a. Anggota Tentara Nasional Indonesia,
  - b. Kepolisian Negara Republik Indonesia
  - c. Pegawai Negeri Sipil
  - d. Pejabat atau Pegawai Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah
- sejak ditetapkan sebagai calon, dan menandatangani surat pernyataan pengunduran diri secara tertulis pada saat ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan dan akan menyampaikan surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah penetapan calon/pasangan calon peserta pemilihan.
5. berhenti sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota sebelum pembentukan PPK dan PPS, dengan melampirkan keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang.
6. memberitahukan pencalonan saya selaku:
- a. Kepala Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Bupati/Walikota melalui Camat yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan;
  - b. Perangkat Desa bahwa saya mencalonkan diri sebagai Gubernur/Wakil Gubernur/Bupati/Wakil Bupati/Walikota/Wakil Walikota\*) dengan menyampaikan surat pemberitahuan pencalonan kepada Kepala Desa yang dibuktikan dengan tanda terima pemberitahuan.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Yang membuat pernyataan,**  
**Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi \*)**



.....

**Keterangan :**

- \*) pilih salah satu.
- \*\*) beri tanda [ √ ] pada kotak yang tersedia jika sesuai.
- \*\*\*) hanya diisi oleh Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**DAFTAR RIWAYAT HIDUP  
CALON BUPATI / WAKIL BUPATI SUKABUMI \*)**

**A. Data Pribadi**

Nama Lengkap	:	
Tempat/Tanggal Lahir	:	
N I K	:	
Usia	:	
Alamat Tempat Tinggal	:	
Email	:	
Jenis Kelamin	:	Laki-laki/Perempuan *)
Status Perkawinan	:	Kawin/Belum Kawin/Pernah Kawin *)
Agama	:	
NPWP	:	
Hobi	:	
Moto Hidup	:	

**B. Riwayat Pendidikan \*\*)**

Pendidikan Formal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

Pendidikan Informal		
Jenjang	Institusi	Tahun (masuk – lulus)

**C. Pengalaman Pekerjaan \*\*)**

Jabatan	Institusi	Tahun

D. Pengalaman Organisasi \*\*)

Jabatan	Institusi	Tahun

E. Publikasi \*\*)

Judul	Tahun Terbit

F. Penghargaan \*\*)

Nama Penghargaan	Institusi	Tahun

G. Data Keluarga

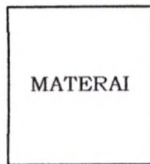
HUBUNGAN KELUARGA	NAMA	PEKERJAAN
Istri/Suami		
Jumlah Anak		
Anak	1. ...	
	2. ...	
	3. dst ...	

H. Lain-lain: .....

.....

Daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
Yang Membuat pernyataan,  
Calon Bupati/Wakil Bupati Sukabumi \*)



(.....)

Mengetahui \*\*\*)

**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Sukabumi**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai .....**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



(.....)

(.....)

**Partai .....**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



(.....)

(.....)

**Partai .....**

**Ketua,**

**Sekretaris,**



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) dimulai dari tahun yang lebih awal

\*\*\*) diisi apabila calon diajukan oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN PENGUNDURAN DIRI \*)**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. N a m a : .....
- b. N I K : .....
- c. NIP/NRP Anggota TNI/Polri/  
NA DPR/DPD/DPRD \*) : .....
- d. Golongan/Pangkat : .....
- e. Jenis Kelamin : .....
- f. Tempat dan tanggal lahir/ umur ..... / .....tahun
- g. Alamat tempat tinggal .....

menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya sebagai Calon Bupati / Wakil Bupati sampai saat ini masih berstatus sebagai :

- a. Anggota DPR/DPD/DPRD Provinsi/DPRD Kabupaten/Kota
- b. Pegawai Negeri Sipil
- c. Anggota Tentara Nasional Indonesia
- d. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia
- e. Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD \*\*)

Dan dalam rangka pemenuhan syarat calon, saya bersedia mengundurkan diri dan tidak akan menarik kembali pengunduran diri saya serta menyerahkan Surat Keputusan Pemberhentian yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah ditetapkan sebagai pasangan calon peserta pemilihan Bupati / Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....



(.....)

Keterangan :

\*) Wajib diisi oleh Anggota DPR/DPD/DPRD, PNS, Anggota TNI/POLRI, Pejabat atau Pegawai BUMN/BUMD yang mencalonkan diri

\*\*) pilih salah satu.

**SURAT PENCALONAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini didaftarkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi oleh Dewan Pimpinan Daerah/Dewan Pimpinan Wilayah/Dewan Pimpinan Cabang atau sebutan lain\*) Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) yang meliputi :

1. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
2. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);
3. Partai ..... dengan perolehan kursi/suara sah \*) ..... kursi/suara \*);

jumlah keseluruhan kursi/suara sah\*) sebanyak ..... Kursi/Suara\*) dan telah memenuhi paling sedikit 20 % dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Sukabumi atau paling sedikit 25 % dari akumulasi jumlah suara sah hasil Pemilu Anggota DPRD Kabupaten Sukabumi.

Nama Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi yang didaftarkan :

1. Calon Bupati :

.....

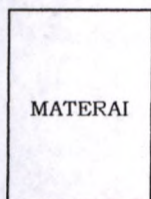
2. Calon Wakil Bupati :

.....

Demikian Surat Pencalonan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Sukabumi  
Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

Partai .....



**Ketua,**

**Sekretaris,**



(.....)

(.....)

Partai .....

**Ketua,**

**Sekretaris,**



(.....)

(.....)

Partai .....

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

Partai .....

Ketua,

Sekretaris,



(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**Catatan :**

Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**KEPUTUSAN PIMPINAN PARTAI POLITIK TINGKAT PUSAT  
TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat Partai .....,  
berdasarkan usulan Pimpinan Partai Politik Provinsi Jawa Barat memberikan persetujuan Pasangan Calon  
Bupati / Wakil Bupati Sukabumi :

**1. Nama Calon Bupati :**

.....

**2. Nama Calon Wakil Bupati :**

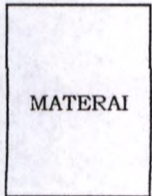
.....

sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi.

Demikian keputusan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Pimpinan Partai Politik Tingkat Pusat**  
**Partai .....**  
**Yang Mengusulkan Pasangan Calon**

**Ketua Umum atau Sebutan lain\*)**



(.....)

**Sekretaris Jenderal atau sebutan lain\*)**



(.....)

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN  
PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DALAM PENCALONAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Partai ..... atau Gabungan Partai Politik Kabupaten Sukabumi yang meliputi :

1. Partai .....;dan
2. Partai .....;dan
3. Partai .....

menyatakan :

1. sepakat untuk mengusulkan Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi; dan
2. tidak akan menarik Pasangan Calon Bupati / Wakil Bupati Sukabumi yang telah diusulkan,

sebagaimana dimaksud dalam Surat Pencalonan (Model B-KWK PARPOL) atas nama :

**Calon Bupati :**

.....

**Calon Wakil Bupati :**

.....

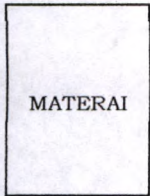
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Sukabumi**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**

.....



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Keterangan :** \*) pilih salah satu

**Catatan :** Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.

**SURAT PERNYATAAN KESEPAKATAN  
ANTARA PARTAI POLITIK/GABUNGAN PARTAI POLITIK\*)  
DENGAN PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

- 1. Partai .....;dan
- 2. Partai .....;dan
- 3. Partai .....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

1. **Nama Calon Bupati :**

.....

2. **Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

**PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk mengikuti proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi sesuai dengan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

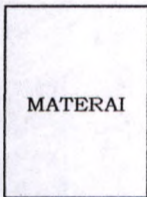
Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Sukabumi**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**

.....



**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Partai**

.....

**Ketua**

(.....)



**Sekretaris**

(.....)

**Pasangan Calon**

**Calon Bupati**

(.....)

**Calon Wakil Bupati**

(.....)

**Keterangan :** \*) pilih salah satu

**Catatan :** Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH VISI, MISI, DAN PROGRAM  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan dibawah ini, Pimpinan Partai Politik Tingkat Kabupaten Sukabumi Partai ..... atau Gabungan Partai Politik\*) Kabupaten Sukabumi yang meliputi :

- 1. Partai .....;dan
- 2. Partai .....;dan
- 3. Partai .....

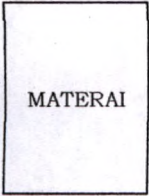
menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)/  
Gabungan DPD/DPC Partai Politik atau sebutan lain \*)  
Kabupaten Sukabumi**

**Yang Mengajukan Pasangan Calon \*)**

**Partai**



**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Partai**

**Ketua**

**Sekretaris**



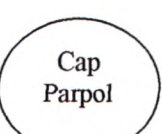
(.....)

(.....)

**Partai**

**Ketua**

**Sekretaris**



(.....)

(.....)

**Keterangan :** \*) pilih salah satu

**Catatan :** Setiap halaman dibubuhi paraf oleh Pimpinan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik

**SURAT PENCALONAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, bersama ini kami :

1. **Nama Calon Bupati :**

.....

2. **Nama Calon Wakil Bupati :**

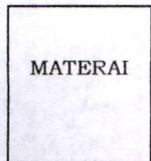
.....

mengajukan diri sebagai pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi dengan keseluruhan jumlah pendukung ..... orang (.....%) dari jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi yang tersebar di .....% Kabupaten Sukabumi, sebagaimana dimaksud dalam Keputusan KPU Kabupaten Sukabumi Nomor 09/Kpts/KPU-Kab-011.329980/2015 tentang Penetapan Persyaratan Dukungan dan Jumlah Sebaran Paling Rendah Pasangan Calon Perseorangan pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015. Surat pencalonan ini sebagai bukti pemenuhan syarat pengajuan calon Bupati dan Wakil Bupati, dan dilampiri Berita Acara rekapitulasi hasil penelitian dukungan Pasangan Calon Perseorangan dari KPU Kabupaten Sukabumi serta dokumen lainnya sesuai ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum.

.....

**Calon Bupati,**

**Calon Wakil Bupati,**



MATERAI

(.....)

(.....)

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu





No	Nama	NIK	Jenis Kelamin	Alamat	RT/ RW	TTL/ Umur	Belum/Sudah/ Pernah Kawin (B/S/P)	TTD/ Cap Jempol
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
	dan seterusnya							

dengan ini menyatakan dengan sebenarnya dan secara sukarela mendukung pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi Tahun 2015, atas nama:

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

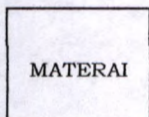
Surat pernyataan dukungan ini dilampiri fotokopi identitas kependudukan.

Demikian pernyataan dukungan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya. Apabila ternyata di kemudian hari ditemukan ketidakbenaran atau saya/kami mengingkari pernyataan dukungan ini, saya/kami bersedia dituntut sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur tindak Pidana Pemilu dan/atau Undang-Undang Hukum Pidana.

.....

**Calon Bupati,**

**Calon Wakil Bupati,**



(.....)

(.....)

**Mengetahui,  
Kepala Desa/Kelurahan/sebutan lain\*\*)**



(.....)

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) diisi **setelah PPS melakukan penelitian faktual**, PPS meminta tanda tangan Kepala Desa/sebutan lain/Lurah setempat sesuai wilayah kerjanya

**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN CALON PERSEORANGAN  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Berdasarkan ketentuan Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum, disusun rekapitulasi jumlah dukungan pasangan calon perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi oleh Pasangan Calon Perseorangan, atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

dengan rincian data sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk Kabupaten Sukabumi ..... jiwa
2. Jumlah total dukungan pasangan calon perseorangan ..... jiwa (.....%)
3. Jumlah Kecamatan .....
4. Dukungan Pasangan Calon Perseorangan tersebar pada ..... kecamatan (.....%)

**Tabel Rekapitulasi Jumlah Dukungan Pasangan Calon Perseorangan**

No	Nama Kabupaten/Kota (diisi hanya untuk Pilgub)	Nama Kecamatan	Nama Kelurahan/Desa	Jumlah dukungan
1.	2.	3.	4.	5.
<b>1.</b>	.....	1. ....	1. ....	.....jiwa
			2. ....	.....jiwa
			3. dst.....	.....jiwa
		2. ....	1. ....	.....jiwa
			2. ....	.....jiwa
			3. dst.....	.....jiwa
		3. ....	1. ....	.....jiwa
			2. ....	.....jiwa
			3. dst.....	.....jiwa

Demikian Rekapitulasi ini disusun untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....

**Calon Bupati,**

**Calon Wakil Bupati,**

MATERAI

(.....)

(.....)

**Keterangan :** \*) pilih salah satu.

**SURAT PERNYATAAN  
TIDAK MENDUKUNG PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

- a. Nama : .....
- b. Nomor KTP/NIK : .....
- c. Alamat : .....
- d. TTL/Umur : ..... / ..... tahun
- e. Jenis Kelamin : .....

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa saya **tidak pernah mendukung** dalam bentuk apapun terhadap terhadap pencalonan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

dan **bersedia/tidak bersedia**\*) membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada tempat yang disediakan pada formulir ini,

.....  
Yang membuat pernyataan

(.....)

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

**SURAT PERNYATAAN KESESUAIAN NASKAH  
VISI, MISI, DAN PROGRAM PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI DENGAN RPJP DAERAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

menyatakan bahwa naskah visi, misi, dan program Pasangan Calon Perseorangan sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah.

Demikian surat pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

.....  
**Calon Bupati,**

.....  
**Calon Wakil Bupati,**

MATERAI

(.....)

(.....)

**Keterangan :** \*) pilih salah satu.

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN JUMLAH MINIMAL DUKUNGAN DAN PESEBARAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun **dua ribu lima belas** bertempat di ....., KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan serta kesesuaian antara data dukungan yang terdapat dalam *softcopy* dan *hardcopy*, untuk Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi, atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam penelitian administrasi, KPU Kabupaten telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melakukan penelitian terhadap jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat di dalam *softcopy*;
- Melakukan penelitian kesesuaian antara jumlah minimal dukungan dan pesebaran yang terdapat dalam *softcopy* dengan *hardcopy* sebagaimana yang terdapat dalam dokumen dukungan Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;

Hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

- Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sejumlah ..... orang;
- Sebaran dukungan Pasangan Calon Perseorangan adalah tersebar di .....% Kecamatan\*) di Kabupaten Sukabumi.
- Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan antara *softcopy* dengan *hardcopy* dinyatakan :
  - a. telah sesuai (isi dengan √)
  - b. tidak sesuai (isi dengan √), dan KPU Kabupaten mengembalikan dokumen dukungan kepada pasangan calon agar dapat diperbaiki pada masa penyerahan dokumen dukungan.

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk PPS melalui KPU Kabupaten Sukabumi dan PPK.
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU Kabupaten Sukabumi,**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.l	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**BERITA ACARA  
HASIL PENELITIAN DUGAAN KEGANDAAN DUKUNGAN  
PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di....., KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian dugaan kegandaan terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam penelitian dugaan kegandaan tersebut, KPU Kabupaten telah melakukan penelitian terhadap dugaan kegandaan dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati, yaitu :

1. Satu orang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) Pasangan Calon; atau
2. Satu orang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) Pasangan Calon perseorangan;

Hasil penelitian dugaan kegandaan dukungan sebagaimana dimaksud di atas adalah sebagai berikut :

1. Jumlah pendukung yang diajukan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati sebanyak ..... orang;
2. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebanyak ..... orang, dan tetap dinyatakan mendukung tetapi selanjutnya akan dilakukan penelitian faktual terhadap yang bersangkutan oleh PPS.
3. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan sebanyak ..... orang, dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan;
4. Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat setelah dilakukan pengurangan terhadap jumlah dukungan ganda yang hanya dihitung 1 (satu). dukungan (No. 1 – No. 3) sebanyak ..... orang.

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPK;
3. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada PPS;
4. 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

**KPU KABUPATEN SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI TERHADAP DOKUMEN DUKUNGAN**  
**PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**SUKABUMI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di....., Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian administrasi terhadap jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam penelitian administrasi, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. meneliti keabsahan surat dukungan pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan;
- b. meneliti kesesuaian antara daftar nama dan alamat pendukung pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dengan fotokopi identitas kependudukan;
- c. meneliti kesesuaian antara alamat pendukung dengan daerah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati,;
- d. meneliti kelengkapan lampiran dokumen dukungan;
- e. meneliti kesesuaian alamat pendukung dengan wilayah administrasi PPS;
- f. meneliti Identitas Kependudukan untuk memastikan pemenuhan syarat usia pendukung.

Hasil penelitian administrasi dukungan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dilakukan PPS adalah sebagaimana terinci dalam tabel berikut :

**TABEL I**  
**HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI DUKUNGAN**

No	U r a i a n	Jumlah	
		BMS	TMS
1	Jumlah pendukung yang dinyatakan belum memenuhi syarat karena tidak terdapat tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai	.....	
2	Jumlah pendukung yang dicoret karena nama, alamat dan NIK yang bersangkutan yang tertera dalam surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan) tidak sesuai identitas kependudukan		.....
3	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan daerah pemilihan		.....
4	Jumlah pendukung yang dicoret karena tidak ditemukan fotokopi identitas kependudukannya sebagai lampiran surat pernyataan dukungan (Formulir Model B.1-KWK Perseorangan)		.....
5	Jumlah pendukung yang dicoret karena alamat yang tertera pada identitas kependudukan yang bersangkutan tidak sesuai dengan wilayah administrasi PPS		.....
6	Jumlah pendukung yang dicoret dan dinyatakan tidak memenuhi syarat karena tidak memenuhi syarat usia atau syarat status pekerjaan sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan		.....
	<b>Jumlah</b>	.....	.....

**Keterangan :** **BMS** : Belum Memenuhi Syarat  
**TMS** : Tidak Memenuhi Syarat

TABEL II  
KESIMPULAN HASIL PENELITIAN ADMINISTRASI OLEH PPS

No	U r a l a n	Jumlah (orang)
1	Jumlah Dukungan berdasarkan hasil penelitian terhadap dugaan kegunaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran <b>Formulir Model BA.2- KWK Perseorangan angka 4</b> untuk masing-masing desa	.....
2	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <b>tidak memenuhi syarat (TMS)</b>	.....
3	Jumlah pendukung yang dinyatakan <b>belum memenuhi syarat (BMS)</b> dan tetap dilakukan penelitian faktual serta wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan	.....
4	Jumlah pendukung pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati yang dinyatakan <b>memenuhi syarat</b> berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS (No.1 dikurangi No.2)	.....

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS.

Berita Acara disampaikan masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**Panitia Pemungutan Suara .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL TERHADAP DUKUNGAN PASANGAN CALON**  
**PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI**  
**SUKABUMI OLEH PANITIA PEMUNGUTAN SUARA**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... tahun **dua ribu lima belas** bertempat di ..... Panitia Pemungutan Suara (PPS) telah melaksanakan penelitian faktual terhadap dokumen dukungan dan hasil penelitian dugaan kegandaan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam penelitian faktual, Panitia Pemungutan Suara telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendatangi setiap tempat tinggal pendukung yang telah dinyatakan memenuhi syarat administratif untuk mencocokkan kebenaran nama dan alamat pendukung, serta dukungannya kepada Pasangan Calon Perseorangan;
- b. Berkoordinasi dengan pasangan calon dan/atau tim penghubung pasangan calon untuk menghadirkan seluruh pendukung di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan untuk mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan, dalam hal pendukung tidak dapat ditemui di alamat yang bersangkutan;

Hasil penelitian faktual dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi yang dilakukan PPS adalah sebagai berikut :

**TABEL I**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL**

No	U r a i a n	Jumlah
1	Jumlah Dukungan yang memenuhi syarat dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi oleh PPS sebagaimana tercantum dalam Form BA.3.1-KWK Perseorangan	.....
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	.....
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak menyatakan dukungannya</b> tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. <b>tidak menyatakan dukungannya</b> dan <b>bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	.....
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan mendukung</b>	.....
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	.....

7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	.....
8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak dapat ditemui</b>	.....
11	Jumlah = No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9	.....

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8, terhadap pendukung yang **tidak dapat ditemui** sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan**, yaitu berkoordinasi dengan Pasangan Calon dan/atau Tim Penghubung Pasangan Calon untuk menghadirkan seluruh pendukung yang tidak dapat ditemui tersebut di wilayah desa/kelurahan pada waktu dan tempat yang telah ditentukan, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

**TABEL II**  
**HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN PERTAMA**

No	U r a i a n	Jumlah
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 8	.....
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	.....
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. <b>tidak menyatakan dukungannya</b> dan <b>bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	.....
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan mendukung</b>	.....
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	.....
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	.....

8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang <b>tidak hadir</b> pada waktu dan tempat yang telah ditentukan	.....
11	<b>Jumlah dukungan yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual lanjutan (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)</b>	.....

Setelah diperoleh jumlah dukungan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil **penelitian faktual lanjutan pertama** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8, terhadap pendukung yang **tidak hadir** sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 7, PPS melakukan **penelitian faktual lanjutan kedua**, yaitu memberikan kesempatan kepada pendukung yang tidak hadir tersebut untuk **datang ke PPS** sampai dengan masa penelitian faktual berakhir, guna mencocokkan dan meneliti kebenaran dukungan.

**TABEL III  
HASIL PENELITIAN FAKTUAL LANJUTAN KEDUA**

No	U r a i a n	Jumlah
1	Jumlah dukungan Pasangan Calon Perseorangan berdasarkan hasil penelitian faktual pertama sebagaimana tercantum dalam Tabel II angka 8	.....
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang mendukung 1 (satu) pasangan calon dan menyatakan dukungannya	.....
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang tidak menyatakan dukungannya tetapi <b>tidak bersedia</b> mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
4	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang : a. tidak menyatakan dukungannya dan bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan b. tidak membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.1-KWK Perseorangan dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia/tidak bersedia mengisi serta membubuhkan tanda tangan/cap jempol pada Formulir Model B.3-KWK Perseorangan c. dinyatakan tidak memenuhi syarat karena status pekerjaan sebagai PNS, anggota TNI/Polri, KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, dan KPU/KIP Kabupaten/Kota, PPK, PPS, KPPS, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, Panwas Kecamatan, PPL, Pegawai Kesekretariatan Penyelenggara Pemilihan, dan Pengawas Pemilihan	.....
5	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan mendukung</b>	.....
6	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan kepada lebih dari 1 (satu) pasangan calon sebagaimana tercantum dalam Formulir Model BA.2-KWK Perseorangan angka 2, dan <b>menyatakan tidak mendukung</b>	.....
7	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan mendukung	.....

8	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
9	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memberikan dukungan lebih dari 1 (satu) kali kepada 1 (satu) pasangan calon perseorangan dan selanjutnya dukungan yang bersangkutan hanya dihitung 1 (satu) dukungan yang ditemukan pada saat penelitian faktual, dan menyatakan tidak mendukung serta tidak bersedia mengisi Formulir Model B.3-KWK Perseorangan	.....
10	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dari daftar dukungan karena <b>tidak datang ke PPS</b> sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan	.....
11	<b>Jumlah Akhir yang dinyatakan memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual (No.1 + No. 2 + No. 3 + No. 5 + No. 7 + No. 9)</b>	.....

Demikian Berita Acara dibuat 5 (lima) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota PPS, dan disampaikan :

1. 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
2. 1 (satu) rangkap untuk PPK dilampiri semua dokumen dukungan setiap Pasangan Calon ;
3. 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi melalui PPK;
4. 1 (satu) rangkap untuk PPL; dan
5. 1 (satu) rangkap untuk arsip PPS.

**Panitia Pemungutan Suara .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1. ....
2.		Anggota	2. ....
3.		Anggota	3. ....

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI DI TINGKAT KECAMATAN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun **dua ribu lima belas** bertempat di ....., PPK ..... telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual yang dilakukan oleh PPS terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual, PPK ..... telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

1. Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan penelitian administrasi dan faktual yang telah dilaksanakan oleh PPS dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
2. Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kecamatan.
3. Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*) :
  - PPK menerima dan melakukan pembedulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di tingkat Kecamatan.
4. Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.4.1 KWK – Perseorangan keberatan dan/atau kejadian khusus.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan berdasarkan hasil penelitian administrasi dan faktual dari PPS, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I  
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN  
DI TINGKAT KECAMATAN**

No	Uraian	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Desa .....	Jumlah
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil penelitian faktual oleh PPS sebagaimana tercantum dalam jumlah akhir pada Tabel III angka 8 Formulir Model BA.3.2-KWK Perseorangan untuk setiap Desa						
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK						
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembedulan oleh PPK						
4	Jumlah pendukung yang dinyatakan memenuhi syarat hasil penelitian faktual dari daftar dukungan dalam Formulir Model B.1 KWK Perseorangan yang tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon Perseorangan dan tanpa materai, dari setiap desa						
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kecamatan yang dinyatakan memenuhi syarat</b> (No. 1 + No. 3) – No. 2)						

**TABEL II**  
**REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN**

NO	KECAMATAN	KELURAHAN / DESA	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 5 Tabel I untuk setiap Desa)
1	.....	a. ....	..... jiwa
		b. ....	..... jiwa
		c. dst.....	..... jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 4 (empat) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota PPK .

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk pasangan calon;
- 1 (satu) rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kecamatan;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**Panitia Pemilihan Kecamatan .....**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.		Ketua	1.
2.		Anggota	2.
3.		Anggota	3.
4.		Anggota	4.
5.		Anggota	5.

**Keterangan :**

\*) pilih salah satu

\*\*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai



**SURAT PENGANTAR**

**Perihal : Penyampaian Berita Acara Hasil  
Rekapitulasi Dukungan Pasangan  
Calon Perseorangan di Tingkat  
Kecamatan**

Kepada :

Yth. Ketua KPU Kabupaten Sukabumi

di -

**SUKABUMI**

Bersama ini disampaikan dokumen hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat kecamatan oleh Panitia Pemilihan Kecamatan di :

Kecamatan : .....

Kabupaten : Sukabumi Provinsi : Jawa Barat

Dokumen hasil rekapitulasi penghitungan perolehan suara terdiri dari :

1. Model BA 4-KWK Perseorangan
2. Model BA 4.1 -KWK Perseorangan
3. Dokumen Dukungan Pasangan Calon Perseorangan

Demikian disampaikan sebagai bahan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten.

**YANG MENYERAHKAN,  
PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN**

.....  
**YANG MENERIMA,  
KPU KABUPATEN SUKABUMI**

.....  
(NAMA LENGKAP)

**DEDE HARYADI, S.Pd**

\*) pilih salah satu

**Catatan :**

- a. Satu Rangkap untuk PPK
- b. Satu Rangkap untuk KPU Kabupaten Sukabumi.

**REKAPITULASI DUKUNGAN PASANGAN  
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
SUKABUMI DI TINGKAT KABUPATEN**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun **dua ribu lima belas** bertempat di ....., KPU Kabupaten Sukabumi. telah melaksanakan rekapitulasi dukungan berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK terhadap dokumen dukungan Pasangan Calon Perseorangan Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Dalam rapat pleno rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten, KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan kegiatan sebagai berikut :

- Melaksanakan rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan oleh PPK dan mengumumkan hasil rekapitulasi;
- Terhadap hasil rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan sebagaimana dimaksud angka 1 , ada/tidak ada\*) keberatan dari pasangan calon/tim penghubung/Panwas Kabupaten.
- Terhadap keberatan yang diajukan sebagaimana dimaksud angka 2 \*\*) :
  - KPU Kabupaten menerima dan melakukan pembetulan.
  - Tidak dapat dibuktikan kebenarannya dan Pasangan Calon atau Tim Penghubung tidak dapat menerima, dan selanjutnya Pasangan Calon atau Tim Penghubung mengisi Formulir Keberatan di Tingkat Kabupaten.
- Mencatat kejadian khusus ke dalam formulir Model BA.5.1 KWK - Perseorangan.

Hasil rapat pleno rekapitulasi dukungan Pasangan Calon Perseorangan di tingkat Kabupaten, sebagaimana terinci pada Tabel I di bawah ini.

**TABEL I  
HASIL RAPAT PLENO REKAPITULASI  
DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DI TINGKAT KABUPATEN**

No	Uraian	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Kec .....	Jumlah
1	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang memenuhi syarat berdasarkan hasil rekapitulasi dukungan di tingkat Kecamatan sebagaimana tercantum dalam Tabel I angka 5 Formulir Model BA.4-KWK Perseorangan dari tiap Kecamatan						
2	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang dicoret dan tidak memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sukabumi						
3	Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan yang ditambah dan memenuhi syarat karena adanya keberatan dan dilakukan pembetulan oleh KPU Kabupaten Sukabumi						
4	Jumlah pendukung sebagaimana tercantum pada Tabel I angka 4 Berita Acara Model BA.4-KWK Perseorangan dari setiap kecamatan, yang wajib dilakukan perbaikan pada masa perbaikan berupa membubuhkan tanda tangan Pasangan Calon Perseorangan dan materai						
5	<b>Jumlah pendukung Pasangan Calon Perseorangan hasil rekapitulasi dukungan tingkat Kabupaten ((No. 1 + No. 3) – No. 2)</b>						

TABEL II  
REKAPITULASI JUMLAH DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN

NO	KABUPATEN	KECAMATAN	JUMLAH DUKUNGAN (Sebagaimana tercantum pada Nomor 5 Tabel I untuk setiap Kecamatan)
1	SUKABUMI	a. ....	..... jiwa
		b. ....	..... jiwa
		c. dst .....	..... jiwa

Demikian Berita Acara dibuat 3 (tiga) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disampaikan kepada :

- 1 (satu) rangkap untuk Pasangan Calon Perseorangan sebagai dokumen untuk melakukan pendaftaran;
- 1 (satu) rangkap untuk Panwas Kabupaten Sukabumi;
- 1 (satu) rangkap untuk arsip; dan

KPU KABUPATEN SUKABUMI,

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

\*\*) beri tanda [√] pada kotak yang tersedia terhadap uraian yang sesuai



**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di....., KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

1. **Calon Bupati :**

.....

2. **Calon Wakil Bupati :**

.....

Hasil penelitian persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip;

**KPU KABUPATEN SUKABUMI,**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**Keterangan :**

\*) Pilih salah satu

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERSYARATAN ADMINISTRASI  
DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

**Nama Calon Bupati :**

.....

**Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

**A. Syarat Pencalonan**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>SYARAT PENCALONAN</b>						
<b>Calon dari Partai Politik</b>						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>Calon dari Perseorangan</b>						
1	Model BA.5 KWK - Perseorangan					
2	Model B KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

**B. Syarat Calon**

**1) Nama Calon Bupati :**

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	BELUM MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotocopy Ijazah					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					

	d. SKCK				
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
6	Naskah Visi, Misi, dan Program				
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat, Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
9	Fotocopy KTP				
10	Pas Foto				
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD				
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :				
	a. Fotocopy surat pengunduran diri				
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :				
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa				
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :				
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU				

	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					
--	---	--	--	--	--	--

\*) pilih salah satu

\*\*) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Belum Memenuhi Syarat (BMS)

**2) Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotocopy Ijazah					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Naskah Visi, Misi, dan Program					
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
9	Fotocopy KTP					
10	Pas Foto					
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD					

	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD					
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotocopy surat pengunduran diri					
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

\*) pilih salah satu

\*\*) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**BERITA ACARA**  
**HASIL PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN ADMINISTRASI DOKUMEN**  
**PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON**  
**DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Pada hari ini ..... tanggal ..... bulan ..... Tahun *dua ribu lima belas* bertempat di ....., KPU Kabupaten Sukabumi telah melaksanakan penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Sukabumi atas nama :

**1. Calon Bupati :**

.....

**2. Calon Wakil Bupati :**

.....

Hasil penelitian perbaikan persyaratan administrasi terhadap kelengkapan dan keabsahan dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon tersebut dituangkan dalam tabel sebagaimana terlampir.

Demikian Berita Acara dibuat 2 (dua) rangkap, masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan anggota KPU Kabupaten Sukabumi.

Berita Acara disusun masing-masing :

1. 1 (satu) rangkap disampaikan kepada pasangan calon; dan
2. 1 (satu) rangkap untuk arsip.

**KPU KABUPATEN SUKABUMI**

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1.	DEDE HARYADI, S.Pd	Ketua	1.
2.	DADANG ISKANDAR	Anggota	2.
3.	FERRY GUSTAMAN, SH	Anggota	3.
4.	MERI SARININGSIH, S.Pd.I	Anggota	4.
5.	TETTY SUFIANTY ZAFAR, MM	Anggota	5.

**LAMPIRAN BERITA ACARA PENELITIAN PERBAIKAN PERSYARATAN  
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN PENCALONAN DAN PERSYARATAN CALON  
DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

**Nama Calon Bupati :**

.....

**Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

**A. Syarat Pencalonan**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>Calon dari Partai Politik</b>						
1	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>Calon dari Perseorangan</b>						
1	Model BA.5 Perbaikan KWK - Perseorangan					
2	Model B Perbaikan KWK - Perseorangan					
3	Model B.1. Perbaikan KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. Perbaikan KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. Perbaikan KWK-Perseorangan					

**B. Syarat Calon**

**1) Nama Calon Bupati :**

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotocopy Ijazah					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					

	d. SKCK				
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK				
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga				
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP				
6	Naskah Visi, Misi, dan Program				
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan				
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank				
9	Fotocopy KTP				
10	Pas Foto				
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :				
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD				
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD				
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :				
	a. Fotocopy surat pengunduran diri				
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang				
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon				
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang				
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :				
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;				
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa				
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :				
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU				

	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran								
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

\*) pilih salah satu

\*\*) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**2) Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KEABSAHAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
1	Model BB.1 KWK					
2	Model BB.2 KWK					
3	Model BB.3 KWK					
4	Fotocopy Ijazah					
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :					
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)					
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)					
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)					
	d. SKCK					
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK					
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga					
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP					
6	Naskah Visi, Misi, dan Program					
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan					
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank					
9	Fotocopy KTP					
10	Pas Foto					
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :					
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD					
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD					

	DPRD					
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :					
	a. Fotocopy surat pengunduran diri					
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang					
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon					
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang					
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :					
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;					
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa					
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :					
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU					
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran					

\*) pilih salah satu

\*\*) Hasil penelitian berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**TANDA TERIMA PENDAFTARAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun **dua ribu lima belas**, telah diterima dokumen persyaratan pencalonan dan persyaratan calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

**Nama Calon Bupati :**

.....

**Nama Calon Wakil Bupati :**

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk *hardfile* dan *softfile* yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Pendaftaran Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

**Yang Menyerahkan,**

.....  
**Yang Menerima,**



(.....)

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA PENDAFTARAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telp : .....

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama : .....

Alamat : .....

Nomor Telp : .....

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari : .....

Tanggal : .....

Waktu : .....

*(Nomor 4 diisi apabila Pasangan Calon Diusul oleh Partai Politik/Gabungan Partai Politik)*

4. Partai Politik atau Gabungan Partai Politik\*) pengusul:

NO	PARTAI POLITIK	ALAMAT KANTOR PIMPINAN	NOMOR TELEPON KANTOR PIMPINAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT DAN/ATAU KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PROVINSI TENTANG KEPENGURUSAN	NOMOR KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON	TANGGAL KEPUTUSAN PIMPINAN TINGKAT PUSAT TENTANG PERSETUJUAN PASANGAN CALON
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.							
2.							
3.							
4.							
5.							

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					

3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotocopy Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	Naskah Visi, Misi, dan Program			
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
9	Fotocopy KTP			

10	Pas Foto			
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy surat pengunduran diri			
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			

\*) pilih salah satu

\*\*) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotocopy Ijazah			

5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	Naskah Visi, Misi, dan Program			
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
9	Fotocopy KTP			
10	Pas Foto			
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy surat pengunduran diri			
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			

	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			
--	---	--	--	--

\*) pilih salah satu

\*\*\*) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

**TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN PASANGAN CALON  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

Bahwa pada hari ..... tanggal ..... bulan..... tahun **dua ribu lima belas**, telah diterima dokumen perbaikan persyaratan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Sukabumi atas nama :

**Calon Bupati :**

.....

**Calon Wakil Bupati :**

.....

yang berisi jenis dokumen dalam bentuk hardfile dan soffile yang akan diperiksa dan akan dicatat dalam Lampiran Tanda Terima Dokumen Perbaikan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati sebagaimana terlampir.

**Yang Menyerahkan,**

.....  
**Yang Menerima,**



(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

(.....)

Nama lengkap dan tanda tangan

**LAMPIRAN TANDA TERIMA DOKUMEN PERBAIKAN  
PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI SUKABUMI**

1. Identitas Calon Bupati :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....

2. Identitas Calon Wakil Bupati :

Nama : .....  
 Alamat : .....  
 Nomor Telp : .....

3. Waktu Penyerahan Dokumen Pendaftaran :

Hari : .....  
 Tanggal : .....  
 Waktu : .....

**A. SYARAT PENCALONAN**

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PENELITIAN KELENGKAPAN DOKUMEN				KETERAGAN
		ADA	TIDAK ADA	MEMENUHI SYARAT	TIDAK MEMENUHI SYARAT	
<b>CALON DARI PARTAI POLITIK</b>						
1	Model B KWK-Parpol					
2	Model B.1 KWK-Parpol					
3	Model B.2 KWK-Parpol					
4	Model B.3 KWK-Parpol					
5	Model B.4 KWK-Parpol					
6	Surat Keputusan tentang Kepengurusan Partai Politik sesuai tingkatannya					
<b>CALON DARI PERSEORANGAN</b>						
1	Model BA.5-KWK Perseorangan					
2	Model B KWK – Perseorangan					
3	Model B.1. KWK-Perseorangan					
4	Model B.2. KWK-Perseorangan					
5	Model B.4. KWK-Perseorangan					

## B. SYARAT CALON

### 1. CALON BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotocopy Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			
6	Naskah Visi, Misi, dan Program			
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
9	Fotocopy KTP			
10	Pas Foto			
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/DPRD			
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy surat pengunduran diri			
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			

	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			

\*) pilih salah satu

\*\*\*) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

## 2. CALON WAKIL BUPATI

NO	JENIS DOKUMEN	HASIL PEMERIKSAAN KELENGKAPAN DOKUMEN		KETERANGAN
		ADA	TIDAK ADA	
1	Model BB.1 KWK			
2	Model BB.2 KWK			
3	Model BB.3 KWK			
4	Fotocopy Ijazah			
5	Dokumen yang diterbitkan Instansi lain, antara lain :			
	a. Surat Sehat Jasmani dan Rohani**)			
	b. Surat Keterangan Bebas Narkoba**)			
	c. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri (tidak pernah dijatuhi pidana penjara, tidak sedang dicabut hak pilihnya, dan tidak sedang memiliki tanggungan utang)			
	d. SKCK			
	e. Surat Tanda Terima penyerahan LHKPN dari KPK			
	f. Surat Keterangan dari Pengadilan Niaga			
	g. Fotocopy NPWP, tanda terima penyampaian SPTPP, dan tanda bukti tidak mempunyai tunggakan pajak dari KPP			

6	Naskah Visi, Misi, dan Program			
7	Daftar nama Tim Kampanye Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Tingkat Desa/Kelurahan			
8	Rekening khusus dana kampanye yang dibuat dalam 1 (satu) bank			
9	Fotocopy KTP			
10	Pas Foto			
11	Apabila Calon adalah Anggota DPR/DPD/ DPRD :			
	a. Surat pemberitahuan pencalonan kepada Pimpinan DPR/DPD/ DPRD			
	b. Tanda Terima dari Sekretariat DPR/DPD/ DPRD			
12	Apabila Calon adalah Gubernur, Wakil Gubernur, Bupati, Wakil Bupati, Walikota atau Wakil Walikota yang mencalonkan diri di daerah lain :			
	a. Fotocopy surat pengunduran diri			
	b. Surat Keterangan bahwa pengunduran diri telah diterima dan sedang dalam proses, yang ditandatangani oleh pejabat yang berwenang			
	c. Surat Keputusan Pemberhentian yang diserahkan paling lambat 1 hari sebelum penetapan pasangan calon			
13	Apabila Calon adalah Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota, Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Panwas Kabupaten/Kota, melampirkan Surat Keputusan pemberhentian dari pejabat berwenang			
14	Apabila Calon adalah Kepala Desa/Perangkat Desa *), melampirkan tanda terima surat pemberitahuan pencalonan yang telah disampaikan kepada :			
	a. Bupati melalui Camat untuk Kepala Desa;			
	b. Kepala Desa untuk Perangkat Desa			
15	Apabila Calon adalah Mantan Narapidana :			
	a. melampirkan bukti pengumuman sebagai mantan narapidana yang dimuat pada surat kabar lokal/nasional dan surat keterangan yang menyatakan bahwa calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang ; ATAU			
	b. surat keterangan dari kepala lembaga pemasyarakatan bahwa yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun sebelum dimulainya jadwal pendaftaran			

\*) pilih salah satu

\*\*) Dokumen akan diserahkan oleh Rumah Sakit Pemerintah yang ditunjuk oleh KPU Kabupaten Sukabumi dan hasilnya adalah berupa Memenuhi Syarat (MS) atau Tidak Memenuhi Syarat (TMS)

Untuk SALINAN yang sah  
 Sesuai dengan aslinya  
 KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI  
 Kepala Sub Bagian Hukum,  
  
**ENCEP RAKHMAT, S.P**  
 NIP. 19601125 198308 1 001

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
 KABUPATEN SUKABUMI,

ttd

**DEDE HARYADI**